

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan berkembang pesatnya Era Globalisasi saat ini telah terjadi banyaknya tuntutan dari masyarakat untuk melakukan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik, terutama dalam penyampaian informasi keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada saat ini pemerintah didorong untuk menyajikan laporan Keuangan Negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dimana amanat ini terdapat pada Pasal 3 (ayat 1) Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam penyajian laporan keuangan akuntabilitas menjadi satu hal yang harus diperhatikan penerapannya, karena dengan adanya akuntabilitas laporan keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan berkualitas. Sehingga laporan keuangan pemerintah dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang nantinya untuk mengukur apakah pemerintah daerah tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Laporan keuangan ada untuk menjadi pembanding antara pendapatan, belanja/beban, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk itu pengelolaan keuangan negara dituntut untuk tertib, transparan, serta akuntabel untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Laporan anggaran dibuat di akhir periode sebagai bentuk mekanisme pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan. Adapun dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di dalamnya berisi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan juga Catatan Atas Laporan Keuangan, yang mana pelaporannya harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku, dimana nantinya akan dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan

yang disajikan dalam laporan keuangan (Putrie, 2018). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Rahayu, 2014). Ada 3 jenis pemeriksaan yang akan dilakukan BPK yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu, yang nantinya pihak BPK akan memberikan opini penilaian berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) , Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) , dan Tidak Wajar (TW).

Tabel 1. 1. Daftar Persentase Opini BPK

Opini	Jumlah LKPD	Persentase
WTP	411	76%
WDP	113	21%
TMP	18	3%
Total	542	100%

Sumber : (<http://www.bpk.go.id>).

Dilihat dari tabel diatas fenomena yang terjadi dalam hasil opini BPK menunjukkan masih banyaknya LKPD yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Dalam masa pelaporan Semester I Tahun 2018 BPK untuk tahun pelaporan 2017 menemukan masih adanya opini WDP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di beberapa daerah. IHPS Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang wajib diserahkan dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari keseluruhannya terdapat 3% yang mendapat opini TMP, meskipun secara umum kualitas LKPD ditahun 2017 meningkat dibanding LKPD 2016. Adapun LKPD yang belum memperoleh opini WTP dan TMP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAP) atau tidak didukung dengan bukti yang cukup.

Jika dilihat dari data yang dikeluarkan oleh BPK khususnya DKI Jakarta memperoleh opini WTP di tahun 2018, namun WTP yang diperoleh baru berjalan

selama 2 tahun. Seperti data dibawah ini yang memperlihatkan tentang opini yang diperoleh DKI Jakarta dalam lima tahun terkahir:

Tabel 1. 2. Daftar Opini BPK

Tahun	Opini
2014	WDP
2015	WDP
2016	WDP
2017	WTP
2018	WTP

Sumber : www.bpk.co.id

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 DKI Jakarta memperoleh opini WTP namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan yang ada dalam laporan keuangan DKI Jakarta seperti (1) Denda Keterlambatan pekerjaan yang belum dipungut/diterima yaitu atas pembangunan *design and build* rehabilitasi total gedung sekolah, pembangunan rumah susun, dan pekerjaan di RSUD Tarakan senilai Rp. 30,41 Miliar, (2) pembangunan dan pengembangan rumah sakit umum kelas D dan pembangunan rehabilitasi total gedung puskesmas senilai Rp. 9,70 Miliar, (3) pemeliharaan berkala di 10 lokasi rumah susun dan pembangunan rumah susun Polri Pesing Jakarta Barat Rp. 3.17 Miliar.

Selain itu penyimpangan yang terjadi di bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD pada Pemprov DKI Jakarta antara lain (1) Pelaksanaan pemusnahan barang persediaan tanpa persetujuan Badan Pengelola Aset Daerah (BAPD) selaku pegelola barang (2) Pemanfaatan aset oleh pihak ketiga tanpa didukung dengan perjanjian kerja sam antaranta pemanfaatan atas gedung dan bangunan, (3) Terdapat aset perjanjian kerja sama yang telah habis jangka waktunya tetapi tidak diperpanjang oleh pihak ketiga, namun belum diproses pengembaliannya. Hal ini membuktikan masih ada ketidaksesuain yang didapat dari LKPD DKI Jakarta oleh BPK.

Dari hasil pemeriksaan BPK tersebut masih ditemukannya sumber temuan yaitu dari aspek pengendalian internal dan kepatuhan terhadap Undang-undang.

Lemahnya SPI yang diterapkan pemerintah membuka peluang bagi oknum tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran baik itu APBD atau APBN (Nurhasanah, 2018). Dalam upaya pengelolaan Laporan Keuangan yang akuntabel pemerintah perlu untuk memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi yang berlaku. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan di Pemerintah baik pusat maupun daerah. SAP menjadi acuan yang mempunyai kekuatan hukum.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Kompetensi SDM merupakan variabel penentu dalam meningkatkan kualitas LKPD (Sudiarianti, Ulupui, & Budiasih, 2015). Pengetahuan merupakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan tugas ini berdasar pada Undang-undang No 17 Tahun 2013 mengenai Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.

Selain Kompetensi Sumber Daya Manusia ada faktor lain yang juga mempengaruhi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual ini dimaksudkan untuk menuju pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih baik. Dimana SAP berbasis akrual ini mencatat segala transaksi yang terjadi di pemerintahan dan menghasilkan *output* laporan keuangan. Penerapan SAP berbasis akrual ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dengan melaksanakan standar akuntansi pemerintah dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan dimaksudkan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.

Selain dari kedua hal tersebut, sistem pengendalian internal juga menjadi pengaruh dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai pendukung dalam penyajian laporan keuangan yang baik berdasarkan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah (Hardyansyah, 2016). Dari temuan BPK masih banyaknya ditemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam sistem pengendalian internal.

Fenomena ini masih banyak dijumpai di mana terdapat jurang antara kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki dengan kompetensi yang seharusnya menjadi syarat bagi seorang pegawai negeri terutama pada Badan Pengelola Keuangan Daerah di DKI Jakarta, yang mana masih ditemukannya beberapa staf yang belum menguasai akuntansi dan juga penerapan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan. Serta belum sepenuhnya menerapkan pengendalian internal pada instansi pemerintah dikarenakan seperti yang ada pada kasus diatas masih ditemukannya kelemahan pada pengendalian internal pemerintah daerah DKI Jakarta. Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil judul “ *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas Laporan Keuangan di pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta*”

1.2. Perumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang penelitian tersebut di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1). Apakah kompetensi dasar sumber daya manusia akan berpengaruh signifikan pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta?
- 2). Apakah pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta?
- 3). Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kompetensi sumber daya manusia dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi DKI Jakarta.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan standar akuntansi pemerintah daerah di provinsi DKI Jakarta.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi DKI Jakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat berguna bagi beberapa pihak, antara lain bagi ilmu pengetahuan, bagi regulator dan bagi investor:

- 1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi para mahasiswa atau pembaca yang tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan dijadikan bahan masukan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

- 2) Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Bagi pihak BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) sebagai pihak regulator bermanfaat sebagai masukan dan saran untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pegawai pemerintah daerah, juga mengikuti pedoman dan kebijakan standar akuntansi pemerintah,

serta menerapkan pengendalian internal di dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dan diharapkan menambah pengetahuan.